

KPK Tak Tahu Aliran Dana Rp300 Triliun di Kemenkeu yang Disebut Mahfud

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengetahui soal aliran dana Rp300 triliun yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD . Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan data mengenai aliran dana tersebut belum diperoleh pihaknya. "300 T? Belum tahu. Data belum ada di KPK," ujar Pahala saat dihubungi CNNIndonesia.com , Kamis (9/3). Sebelumnya, Mahfud menyampaikan temuan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (8/3). Menurut Mahfud, transaksi mencurigakan ini berbeda dengan transaksi dari rekening pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar. "Saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang Rp500 miliar (temuan PPATK)," jelas dia. Lebih lanjut, Mahfud mengklaim sudah menyerahkan informasi itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. "Kemarin ada 69 orang (pegawai Kemenkeu berharta tak wajar) dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T, harus dilacak," imbuhnya. Mahfud mengungkapkan sekitar 460 pegawai Kemenkeu terlibat transaksi janggal Rp300 triliun tersebut. Menurutnya, temuan itu berdasarkan pada 160 laporan yang dilayangkan sepanjang 2009 hingga 2023.